

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENINGKATAN KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DI SURIAH

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi / penyebab Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam konflik di Suriah dan dijabarkan melalui sub bab, yaitu sebagai berikut; Kondisi dalam negeri Amerika Serikat, Ekonomi dan Militer serta Konteks Internasional.

A. Kondisi Dalam Negeri Amerika Serikat

Presiden Obama sebagai *Policy Influencer* berupaya meyakinkan Kongres untuk membantu rakyat Suriah dan oposisi Rezim Assad untuk menyelesaikan krisis tersebut karena salah satu kepentingan utama Amerika sejak 1973 yaitu untuk menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Untuk memperkuat kepemimpinan Amerika di dunia Obama akan memperkuat keamanan dengan menginvestasikan dana pada bidang kemanusiaan, demi menciptakan dunia yang lebih baik Obama berusaha untuk mencerminkan perilaku yang baik agar dapat menjadi aspirasi masyarakat Amerika dan masyarakat dimanapun harus bisa dan memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka tanpa rasa takut.

Promosi HAM tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, tetapi juga di luar negeri oleh karena itu HAM memegang peranan penting dalam kebijakan luar negeri sepanjang sejarah Amerika Serikat yang dimana dalam kasus Suriah Amerika berusaha untuk melakukan intervensi dalam Konflik Suriah karena terdapat kasus pelanggaran HAM dalam bentuk konkrit yaitu dengan adanya penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Rezim Assad dalam peperangan terhadap rakyatnya sendiri.

Walaupun masyarakat Amerika kurang mendukung adanya intervensi pemerintah yang dilakukan di Suriah, hal ini

ditunjukkan dengan aksi demonstrasi di depan Gedung Putih pada 28 September 2013 yang dimana para aktivis anti perang menginginkan agar Amerika tidak ikut campur dalam konflik tersebut lantaran hanya memperumit konflik yang terjadi di Suriah.

Hal serupa juga dilakukan di New York Times Square dimana sekitar 200 orang meneriakkan “tidak berperang di Suriah”, di Houston sebaliknya terdapat aksi yang mendukung serangan militer ke Suriah lantaran penggunaan senjata kimia oleh Rezim Assad yang menewaskan ratusan orang.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters pada 26 April hingga 1 Mei 2013 kepada warga Amerika Serikat, hanya sebesar 10 persen warga Amerika yang setuju terhadap intervensi Amerika di Suriah, sedangkan 61 persen responden menolak keterlibatan Amerika di Suriah. Tetapi jika dikaitkan dengan penggunaan senjata kimia oleh Rezim Assad terhadap rakyatnya, jumlah warga yang setuju meningkat persentasenya sebesar 27% sedangkan 44% tetap menolak adanya intervensi tersebut. Hal ini bisa dikaitkan dengan kejadian masa lalu dimana Amerika mengintervensi Afghanistan dan Irak sehingga masyarakat Amerika merasa lelah dan tidak berselera terhadap hal-hal yang berbau intervensi.

Walaupun begitu pemerintah tetap melakukan intervensi melalui berbagai cara, seperti pengiriman bantuan berupa makanan, obat-obatan dan bantuan berupa pendanaan bagi pihak oposisi yang berusaha menggulingkan Assad, lalu Amerika menggunakan Organisasi Internasional untuk membantu mengumpulkan berbagai macam bantuan bagi Suriah, lalu dari segi militer serangan udara oleh militer Amerika di Suriah yang menewaskan puluhan tentara pemerintah Suriah yang terjadi pada tahun 2016 mendapat

kecaman dari berbagai pihak terutama Rusia karena pihak Amerika dianggap tidak mau berkoordinasi atas serangan itu.¹ Pemerintah Amerika menilai bahwa intervensi nya di Suriah merupakan tindakan yang sudah diperhitungkan dengan baik terlepas dari ketidaksetujuan mayoritas warga nya.

B.Ekonomi dan Militer

Melihat terjadi nya konflik di Suriah Amerika tidak tinggal diam, Presiden Obama sebagai *Policy Influencer* berusaha meyakinkan Kongres agar memberikan bantuan kepada pihak oposisi Suriah, hal ini dibuktikan dengan pemberian bantuan *Non-Lethal Aid* kepada kelompok oposisi agar dapat terus berjuang melawan Rezim Assad yang dibantu oleh Rusia.

Amerika juga berencana melakukan *Limited Military Strike* kepada Suriah dikarenakan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil yang menyebabkan timbul nya ratusan korban jiwa, Amerika menggunakan isu ini untuk membuka pintu masuk terhadap intervensi nya di Konflik Suriah. Langkah Amerika melalui jalur diplomatis berupa pengajuan Resolusi DK PBB terkait penggunaan senjata kimia tersebut yang menurut OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon) bahwa penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh militer Suriah dikategorikan sebagai temuan yang dapat dibuktikan dan telah melanggar Resolusi PBB 2118 tahun 2013.² Di dalam resolusi tersebut tertera bahwa Suriah tidak diperbolehkan menggunakan, mengembangkan,

¹Konflik Suriah: Serangan Udara AS Tewaskan Puluhan Tentara Pemerintah,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160918_dunia_as_suriah, diakses pada 19 Februari 2018.

²Security Council Condemns use of Chemical Weapon in Syria,

<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50266#.VYobWPmqqko>, diakses pada 19 februari 2018

memproduksi atau bahkan mendapatkan atau mengumpulkan senjata kimia. Atau mengirim secara langsung ataupun tidak langsung kepada aktor negara dan non-negara.³

Langkah lain yang dilakukan oleh Amerika yaitu dengan melakukan pertemuan *Action Group for Syria Final Communiqued* di Swiss, Konferensi tersebut bertujuan untuk memediasi perdamaian di Suriah yang dihadiri oleh anggota “London 11” yaitu sebuah sebutan bagi negara-negara yang mendukung perdamaian di Suriah yang dimana kelompok ini menolak penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh Rezim Bashar al-Assad sebagai cara untuk meredakan konflik dengan rakyatnya sendiri.

Dengan bekerjasama dengan Organisasi Internasional Amerika berhasil mengumpulkan dana sebesar USD 260 Juta yang akan digunakan untuk membantu pihak oposisi dalam memenuhi kebutuhan dan membantu transisi Suriah menjadi negara Demokratis, sumbangan tersebut termasuk \$15 juta yang ditujukan untuk *Syria Recovery Trust-fund* yang akan digunakan untuk recovery Suriah pasca perang.

Amerika dan berbagai Organisasi Internasional lainnya berusaha untuk membantu Suriah dalam krisis di negaranya ini. Sampai 27 September 2016 pemerintah Amerika mengumumkan bahwa Amerika akan menambahkan bantuan humaniter kepada Suriah sebesar USD 364 Juta, jika di total sejak tahun 2011 maka sebesar \$6 miliar A.S telah dikururkan untuk penanganan darurat di Suriah termasuk untuk menyediakan cadangan makanan, obat-obatan, air minum

bersih dan suplai lainnya untuk membantu masyarakat Suriah yang terdampak oleh perang.⁴

³Security Council Report: Resolution 2118, www.securitycouncilreport.org, diakses pada 20 Januari 2018.

Dengan adanya penggunaan senjata kimia Amerika menganggap persoalan ini merupakan pelanggaran HAM dan Amerika sebagai negara demokrasi terbesar merasa sudah saatnya Suriah menjadi negara yang demokratis, apabila terdapat upaya yang mengancam proses demokratisasi di Suriah akan dianggap sebagai ancaman bagi tercapainya perdamaian di Suriah, ini dilihat dari usaha Rusia dalam memveto setiap usulan resolusi yang diajukan oleh Amerika untuk melindungi sekutunya yaitu Bashar al-Assad, bahkan Rusia pernah memveto tiga kali dalam sidang PBB pada Oktober 2011 atas draft resolusi No. S/2011/612 sebagai bentuk dukungannya terhadap Suriah, Amerika juga mendukung Dewan Koalisi Nasional Suriah selaku lembaga oposisi yang mengawasi proses transisi Demokrasi di negara tersebut.

Amerika Serikat pun membuat serangkaian tindakan dalam kebijakan luar negerinya terhadap Suriah salah satunya yaitu Amerika membentuk koalisi oposisi baru yang bertujuan untuk menciptakan konstitusi dan transisi politik baru serta melegalkan nya sebagai pemerintahan yang sah secara sepihak bagi Suriah. Melalui Menteri Luar Negerinya John Kerry Amerika berjanji akan terus meningkatkan keterlibatannya di Suriah terutama setelah adanya upaya Rusia untuk membantu Rezim Assad agar tidak turun dari kepemimpinannya, Amerika melalui kelompok oposisi *Free Syrian Army* memberikan dukungan dan bantuan senjata berupa rudal anti-tank kepada kelompok-kelompok pemberontak sejak Rusia ikut menurunkan Jet tempurnya untuk melawan pemberontak dalam peperangan.

Presiden Obama juga berhasil meyakinkan Kongres untuk memberi bantuan berupa pasokan obat dan pangan kepada pasukan pemberontak dan Amerika juga akan

⁴USAID: Crisis in Syria, <https://www.usaid.gov/syria>, diakses pada 19 Februari 2018

memberikan bantuan dana sebesar \$60 juta untuk membantu oposisi dalam memperluas wilayah kekuasaannya, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry.⁵

Pemberian bantuan berupa uang dan militer tersebut dapat dilakukan oleh Amerika karena sebagai negara yang memiliki perekonomian terbesar di dunia dan memiliki militer yang terbaik di dunia tentu saja Amerika tidak segan untuk membantu terutama dikarenakan adanya keterlibatan Isu HAM dan keterlibatan Rusia yang merupakan salah satu pesaing utama Amerika dalam hal militer dan ekonomi. Tidak terlepas pula dari hubungannya di masa lalu yang mana keduanya terlibat dalam Proxy War.

Gambar 4.1. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin

⁵http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130228_suriah_bantuan, diakses pada 19 februari 2018



Sumber: <https://dunia.tempo.co/read/811687/putin-marah-perintahkan-warga-rusia-di-luar-negeri-pulang>

C. Konteks Internasional

Dalam konteks Internasional pola interaksi antara negara-negara pada umumnya dilandasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai oleh sebuah negara.

Masing-masing negara dalam dunia internasional wajib memberikan tanggapan atas setiap isu internasional yang sedang terjadi, dan setiap negara memiliki pandangan, konsep dan cara tersendiri terhadap politik internasional begitu pula dengan Amerika.

Untuk memperkuat kepemimpinan Amerika di dunia Obama akan memperkuat keamanan dengan menginvestasikan dana pada bidang kemanusiaan, demi menciptakan dunia yang lebih baik Obama berusaha untuk mencerminkan perilaku yang baik agar dapat menjadi aspirasi masyarakat Amerika dan masyarakat dimanapun harus bisa dan memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka tanpa rasa takut. Amerika Serikat

juga berkomitmen untuk memperkuat pilar dari masyarakat dunia yang adil

Presiden Obama melakukan intervensi terhadap Konflik Suriah dengan menggunakan seperangkat organisasi yang mendukung kebijakan Amerika tersebut seperti PBB yang dimana Amerika merupakan termasuk kedalam Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto.

Situasi di Suriah memungkinkan Amerika dan sekutunya melancarkan ancaman dan ancaman untuk melakukan intervensi terhadap Krisis Suriah dikarenakan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rezim Assad terhadap rakyatnya yang menggunakan senjata kimia untuk melawan rakyatnya sendiri, hal tersebut membuat Suriah mendapatkan ancaman dari Komunitas Internasional dan membuat Rezim Assad semakin kehilangan legitimasinya sebagai pemimpin Suriah.

Oleh sebab itu negara-negara barat mendesak agar Bashar al-Assad mengundurkan diri sebagai langkah awal menuju perdamaian, tetapi Bashar al-Assad menolak hal tersebut dan mengaskan bahwasannya ia akan tetap menduduki jabatannya dan mengalahkan pihak oposisi. Upaya yang dilakukan oleh komunitas internasional adalah dengan mengadakan

Konferensi Jenewa II atas prakarsa Amerika dan Rusia yang dimediasi oleh PBB, dimana dalam pertemuan tersebut kedua pihak yang bersengketa diharapkan dapat duduk bersama membentuk sebuah pemerintah transisi dengan wewenang eksekutif penuh, namun nampaknya Konferensi Jenewa ini belum dapat memberikan dampak yang berarti akibat adanya perbedaan kepentingan-kepentingan pihak terkait dalam konflik ini.⁶

⁶Adirini Pujayanti, *Internasionalisasi Konflik Suriah dan Peran Indonesia*, artikel,

Amerika serta negara-negara sekutu seperti Inggris, Perancis, Arab Saudi dan Turki mendukung agar pihak Oposisi dari Rezim Assad seperti FSA (Free Syrian Army) untuk terus melakukan perlawanan agar terwujudnya pemerintahan yang demokratis, sedangkan di sisi lain Russia dan Iran mendukung Rezim Bashar al-Assad untuk terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin Suriah, Russia memiliki markas militer di wilayah Suriah tepatnya di Tartus sehingga dengan mudah memobilisasi militernya jika Amerika dan sekutunya melancarkan serangan terhadap Suriah.

Dengan adanya kedua negara besar yang terlibat maka sangat jelas bahwasannya situasi dunia internasional semakin memanas hingga muncul isu Perang Dunia ke tiga akan terjadi di Suriah antara Amerika dan sekutunya melawan Russia, tetapi isu tersebut mulai hilang tetapi tidak dengan Krisis yang terjadi di Suriah. Meningkatnya keterlibatan Amerika jelas dikarenakan adanya pelanggaran HAM terhadap rakyat Suriah yang diserang oleh Rezim Assad menggunakan senjata kimia, keinginan masyarakat Suriah untuk berdemokrasi serta hadirnya Russia dan Iran sebagai pendukung Rezim Assad membuat situasi semakin memanas, situasi semakin memanas ketika Russia dan Rezim Suriah melancarkan serangan udara

terhadap kota Aleppo, Perancis yang merupakan sekutu Amerika melalui Presidennya Francois Hollande pada 20 Oktober 2016 dalam penutupan KTT mengkritik keras atas serangan yang dilakukan oleh Russia dan Suriah tersebut dan menyebutnya sebagai kejahatan perang dan dianggap tidak manusiawi.

Akibat dari Konflik tersebut terdapat tiga juta lebih pengungsi Suriah di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, Irak dan Turki hingga akhir tahun 2013, untuk

menanggulangi hal tersebut badan PBB yang menangani masalah pengungsi UNHCR telah meminta kepada negara-negara Eropa untuk menerima lebih dari satu juta pengungsi di negara nya.

Pada tahun 2015 sebanyak 38 negara Eropa mencatat bahwa 264.000 aplikasi permintaan suaka telah diberikan, dibandingkan dengan tahun 2013 permintaan meningkat sebesar 24%, dari jumlah tersebut 216.300 diantaranya diajukan kepada 28 negara anggota Uni Eropa, Antonio Guterres sebagai direktur UNHCR meminta agar Uni Eropa mengarahkan tenaga nya untuk menangani masalah ini.

Suriah menjadi negara yang mengajukan permintaan suaka terbanyak di 11 dari 28 negara Uni Eropa, 31 ribu di tampung oleh Swedia dan 41 ribu oleh Jerman. Pada 31 Desember 2016 UNCHR mencatat 362.753 pengungsi tiba di Eropa melalui laut mediterania.

PBB telah memiliki resolusi untuk mengenai penanganan pengungsi dengan resolusi No. 429 (V) Desember 1950, Majelis umum mengadakan konferensi untuk membahas tentang pengungsi dan menghasilkan akta final mengenai penanganan pengungsi. Akta tersebut merupakan simbol dari komitmen negara-negara untuk meminimalisir permasalahan pengungsi dan individu yang tidak memiliki kewarganegaraan, hal tersebut ditindaklanjuti dengan diaturnya ketentuan-ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang penanganan pengungsi.

Di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951 dan protokol mengenai Status Pengungsi tahun 1967 terdapat pedoman bagi Hukum Pengungsi Internasional untuk masalah penanganan pengungsi termasuk klasifikasi, hak dan kewajiban pengungsi serta kewajiban negara peserta konvensi terhadap pengungsi.